

ASET PEMKAB JADI BANCAKAN

PAD Bocor ke Rekening Oknum

BACA SELENGKAPNYA DI HALAMAN 2



Belasan Tahun Jadi Temuan BPK

Dibiarkan Pejabat Tanpa Penindakan

PENYALAHGUNAAN aset milik daerah terus terjadi di Bumi Batiwakkal tanpa ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Berau. Deretan pertokoan di Jalan AKB Sanipah I menjadi salah satu lokasi aset yang diduga terjadi “transaksi gelap.”

Pada 2011, Pemerintah Kabupaten Berau menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang salah satunya menetapkan tarif sewa kios 4x6 sebesar Rp250 ribu per bulan per kios.

Namun, fakta di lapangan mengungkapkan hal yang berbeda. Berdasarkan penelusuran Berauterkini, rata-rata penyewa membayar dengan jumlah cukup besar setiap tahunnya. Mereka yang berhasil diwawancarai menyebut harus membayar sewa kios tersebut Rp20-30 juta per tahun.

Salah seorang penyewa lapak berinisial SR mengaku menyewa tempat di sana kepada seseorang di Kecamatan

Tanjung Redeb.

“Saya nyewa per tahun Rp25 juta. Sama orang juga (sewanya), kalau tidak salah tinggalnya di Jalan Pulau Panjang atau Gunung Panjang,” jelasnya, Rabu (12/11/2025).

Tapi, kata dia, jumlah itu termasuk murah jika dibandingkan tetangganya yang harus membayar lebih tinggi darinya.

“Yang di sebelah saya itu bilang Rp30 juta per tahun,” ungkapnya.

Jumlah ini berbanding terbalik dengan salah seorang penyewa lain berinisial AN yang mengaku tinggal di sana sejak tahun 1980-an bersama keluarganya.

Meski tinggal di lokasi yang sama, namun harga sewa yang harus dibayar jauh lebih murah. “Saya perbulan hanya Rp600 ribu,” jelasnya.

Dia juga menyadari, kawasan itu merupakan tanah milik pemerintah.

“Di sini lahannya milik pemerintah. Kalau dari tempat saya ini ke Gang Empat Kali Enam,” paparnya.



Adanya perbedaan harga sewa di sana menurutnya cukup besar. Namun apa penyebabnya dia tidak tahu.

“Saya tidak tahu. Yang jelas kami hanya Rp600 ribu per bulan, dan memang kami di sini sudah lama tinggalnya,” jelasnya.

Di lokasi yang sama, SN mengaku membayar perbulan Rp1 juta. Tempat yang disewanya bukan lapak, melainkan hanya kamar untuk dia tinggal.

Dia membayar kepada seseorang yang kini tinggal di Samarinda.

“Saya sewa hanya tem-

pat ini untuk tinggal. Sewanya satu juta per bulan. Yang menyewakan sekarang tinggal di Samarinda,” katanya.

Dia juga mengetahui, bangunan yang ditinggalinya berdiri di atas lahan milik pemerintah. Bahkan, dirinya juga mengetahui patok batas lahan pemerintah di sana.

“Iya ini lahan pemerintah. Kalau tidak salah sampai ke depan mini market di sana. Kalau patoknya ada di sana,” tandasnya, sambil menunjukkan batas patok lahan Pemkab Berau.

BACA SELINGKAPNYA DI HALAMAN 3

KEBOCORAN PAD

Praktik curang yang terjadi pada aset milik Pemkab Berau di Jalan AKB Sanipah I menjadi ironi di tengah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stagnan. Bahkan, pemanfaatan aset daerah yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk pembangunan, justru terjadi kebocoran yang nyata-nyata nampak jelas dari halaman Pemkab Berau.

Padahal, jika aset-aset tersebut bisa dimaksimalkan realisasi retribusinya, pemerintah bisa menambal anggaran di tengah isu pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Dari sederet objek pendapatan daerah, ada yang bersumber dari retribusi atas pemanfaatan jasa ataupun fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi yang sesuai dengan Perda Nomor 7/2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam perda tersebut, retribusi diartikan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Setiap pengguna akan diberikan tanggungan untuk aktif memberikan retribusi daerah melalui badan atau lembaga pemerintah resmi yang mengumpulkan retribusi tersebut.

Pada beleid itu, setidaknya terdapat tiga jenis retribusi, yakni retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

PEMBIARAN BELASAN TAHUN

Terkait retribusi melalui jasa usaha, Pemkab Berau pada 1979 telah mendirikan kios 4x6 di Jalan AKB Sanipah I. Saat itu, kios tersebut disewa oleh 79 orang sebagai bentuk kepedulian pemerintah atas peristiwa kebakaran yang



melanda Pasar Kebun Sayur.

Berdasarkan data Diskoperindag, sejak 1979-2012 terdapat dua kali perjanjian atas sewa kios 4x6. Surat perjanjian yang pertama dibuat pada 1994, di mana masa sewa 1 Januari 1994 sampai 31 Desember 1994 dengan tarif sewa sebesar Rp7.200 per bulan. Selanjutnya, tarif sewa terus meningkat sampai sebesar Rp25 ribu, namun tidak didukung dengan perjanjian sewa.

Berdasarkan data laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemkab Berau pada 2014, dibeberkan banyak data terkait kios tersebut.

Pada 2011, Pemkab Berau menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang salah satunya menetapkan tarif sewa kios 4x6 sebesar Rp250 ribu per bulan per kios.

Berdasarkan perubahan tarif tersebut, Diskoperindag membuat perjanjian sewa kios 4x6 pada 2012. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut meliputi jangka waktu

sewa, tarif sewa, kewajiban, dan denda.

Dalam perjanjian tersebut, terdapat pasal yang melarang untuk mengubah/menambah bangunan yang ada. Namun, dalam perjanjian tidak mencantumkan sanksi jika larangan tersebut dilanggar. Selain itu, perjanjian tersebut tidak mengatur nilai sewa per meter persegi.

Dari 79 petak kios 4x6 yang ditempati penyewa, terdapat satu kios yang ditukar guling sesuai Berita Acara Penyerahan Hak atas Tanah dan Bangunan pada 24 April 1991 antara Bupati Berau dengan Sattaruddin yang bertindak atas nama Almarhum Haji Muhammad Saad.

Perjanjian sewa kios 4x6 pada 2012 dibuat atas 78 penyewa kios. Namun, data dari Diskoperindag Berau menunjukkan terdapat 55 surat perjanjian sewa yang telah ditandatangani oleh penyewa. Sebanyak 23 perjanjian sewa kios 4x6 belum dikembalikan oleh penyewa kios karena mereka merasa keberatan

dengan adanya kenaikan tarif sewa tersebut.

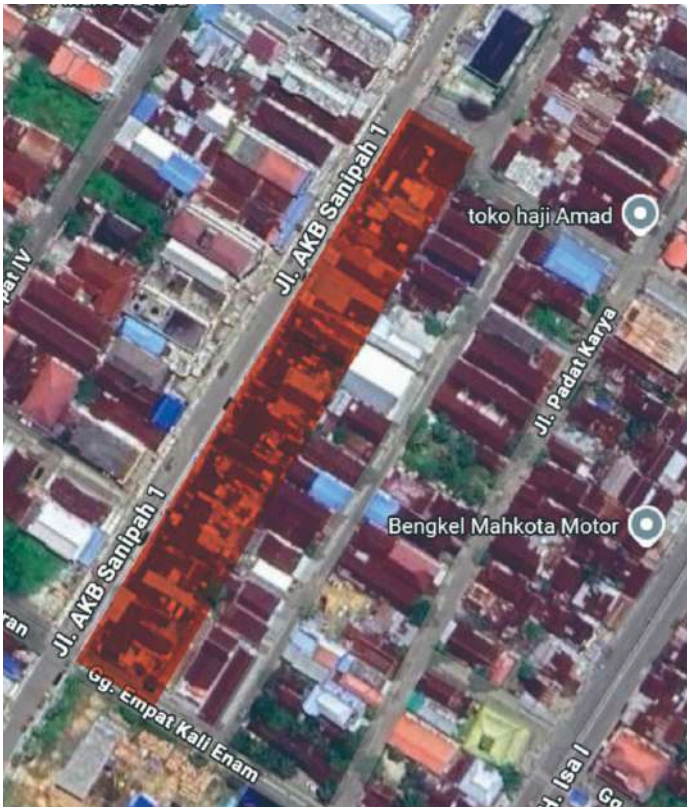
Dalam catatan itu, BPK mendapati dua potensi kerawanan yang berpengaruh terhadap keuangan daerah. Pertama, lahan dan kios dapat disalahgunakan oleh penyewa kios dan potensi hilangnya pendapatan daerah yang dilakukan oleh penyewa.

Dari kasus itu, BPK merekomendasikan Kepala Diskoperindag segera memperbarui perjanjian sewa kios 4x6 tahun 2012. Perjanjian tersebut mengatur klausul denda atas perubahan bentuk bangunan yang dilakukan penyewa.

Kedua, merekomendasikan Kepala Diskoperindag dan Kepala BPKAD berkoordinasi dalam bentuk rekonsiliasi, melakukan evaluasi perjanjian, dan pengelolaan sewa kios 4x6 serta pelaporannya secara rutin dan periodik.

Persoalan ini pun urung mendapat titik terang, kendati kios 4x6 masih ditempati dan beroperasi hingga saat ini.

BACA SELINGKAPNYA DI HALAMAN 4



Kondisi ini juga sempat disoroti Berauterkini pada 2023 dengan berita yang berjudul 'Pemkab Bakal Benahi Lapak Kios 4x6 Jalan AKB Sanipah I. Pj Sekda: Biaya Sewa Bakal Berubah'.

Namun, dua tahun berselang, belum ada kejelasan terkait rencana pembenahan kawasan tersebut atau pun langkah strategis yang diambil oleh Diskoperindag Berau untuk penataan dan pendapatan retribusi.

Persoalan ini juga mendapat sorotan Wakil Bupati Berau, Gamalis. Dia menyatakan, pemerintah bakal melakukan langkah pengawasan dan pendataan ulang terkait data penyewa yang saat ini bermukim di tempat tersebut.

"Langkahnya harus humanis, kami melihat kawasan itu strategis dan bisa dibuat lebih baik lagi," kata Gamalis.

Dia menyebut, sinkronisasi data yang dikelola oleh pe-

merintah memerlukan pemutakhiran. Hal itu mengingat rekomendasi BPK tersebut sudah berlangsung lama dan berpotensi terjadi perubahan dari pihak yang menyewa tempat tersebut.

Di tengah ancaman pengurangan APBD saat ini, kata Gamalis, dibutuhkan langkah strategis pemerintah untuk memastikan setiap objek pajak dapat terealisasi dengan maksimal. Tak hanya retribusi yang memiliki potensi, namun banyak sumber retribusi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai PAD.

"Banyak potensi lain yang dapat dimanfaatkan," sebutnya.

Dia berpesan kepada setiap lapisan masyarakat agar tak pernah lupa dengan kewajiban membayar pajak. Sebab, sejatinya pembangunan daerah ditopang dari tertibnya masyarakat membayar retribusi dan pajak ke daerah.

Di sisi lain, pemerintah

juga memastikan setiap pajak dan retribusi yang diberikan dapat difungsikan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pemerintah komitmen untuk lebih akuntabel dan profesional dalam mengelola pajak dan retribusi daerah," tegasnya.

PERLU PENATAAN

Kepala Bagian Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) Berau, Wahid Hasyim, mengungkapkan kebutuhan pemerintah dalam penataan aset. Dalam hal ini kios 4x6 yang berada dalam kawasan strategis karena keberadaannya persis di jantung kota.

Dirinya sepakat bila aset tersebut perlu diberikan sentuhan lebih oleh pemerintah mengingat keberadaannya saat ini sudah semakin kumuh.

Dia mengatakan, Berau yang menjadi daerah tujuan wisata belum memiliki tempat yang dapat menyajikan kuliner

khas dalam satu kawasan.

Menurut dia, kawasan kios 4x6 sangat tepat untuk menyediakan fasilitas, seperti 'food court', sebagai tempat singgah wisatawan sebelum menyeberang ke kawasan wisata bahari di Berau.

"Bisa dibangun tempat yang lebih bagus dan representatif. Kios itu berdiri di pusat kota," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie, menerangkan, pendapatan yang diberikan dalam proses sewa itu masuk dalam retribusi penggunaan kekayaan daerah.

Ia menyatakan, proses pemungutannya masih dilakukan Diskoperindag Berau, termasuk untuk pungutan sewa kios di Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD) Teluk Bayur.

"Tapi angka pemasukannya tetap berada di Bapenda Berau," bebernya.



GAMALIS



DJUPIANSYAH GANIE

Berdasarkan data, realisasi penerimaan dari penyewaan kios 4x6 di Berau setiap tahunnya relatif fluktuatif. Pada 2022, Bapenda Berau menerima realisasi senilai Rp175,5 juta.

Kemudian, naik pada 2023 menjadi Rp396,5 juta. Angka tertinggi terjadi pada 2024 senilai Rp534,6 juta. Hingga Triwulan III/2025, Bapenda Berau sudah mencatatkan pendapatan retribusi senilai Rp290 juta.

"Relatif naik turun, tapi pendapatan selalu masuk dari sewa kios 4x6 itu," ungkap dia.

Berauterkini juga telah melakukan upaya konfirmasi kepada Diskoperindag Berau demi mengetahui langkah strategis dinas dalam mengatasi potensi kebocoran retribusi dari kios 4x6 di Jalan AKB Sanipah I.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada jawaban dari Kepala Diskoperindag Be-

rau, Eva Yunita, yang diketahui sedang berada di luar kota.

DATA ULANG DAN TERTIBKAN LAPAK

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menegaskan pentingnya pendataan ulang serta penertiban seluruh lahan, petak, dan lapak milik pemerintah daerah yang menjadi objek retribusi.

Langkah ini dinilai mendasak karena adanya praktik sewa yang tidak sesuai dengan tarif resmi yang diatur dalam peraturan daerah.

Rudi mengatakan, informasi mengenai adanya sewa lapak di Jalan AKB Sanipah I yang tarifnya tidak sesuai nilai retribusi yang telah ditetapkan Pemkab Berau harus ditindaklanjuti.

"Ini jelas merugikan PAD dan harus ditertibkan. OPD terkait harus menindaklanjuti," tegasnya.

Menurut Rudi, upaya

meningkatkan PAD memang membuka peluang revisi terhadap aturan retribusi. Namun, sebelum itu, dia menekankan pentingnya validasi data aset dan objek retribusi agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Pihaknya pun meminta Pemkab Berau untuk mendata ulang seluruh aset retribusi.

"Isu soal petak ukuran 4x6 meter sempat mencuat, tapi informasi detailnya belum kami terima dari OPD. Saat itu, anggota Komisi II, Nurung, juga sempat mempertanyakan masalah ini ke Diskoperindag," jelasnya.

Politisi PDIP ini juga menyampaikan perlunya perbaikan tata kelola kios dan lapak yang menjadi sumber retribusi, terutama bagi pelaku UMKM yang menyewa lahan pemerintah.

Penarikan retribusi harus dilakukan sesuai tarif resmi yang tertuang dalam perda. Sehingga, jangan sampai ada

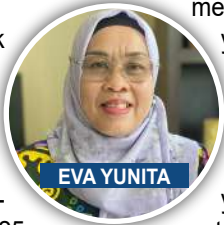
pihak yang bermain melakukan monopoli tarif.

"Jangan sampai ada lapak yang membayar sewa berbeda dari yang telah ditetapkan. Ini harus dibenahi. OPD terkait mulai sekarang harus serius mendata dan menertibkan asetnya," tegas Rudi.

Jika terdapat aset yang sulit dikelola atau tidak optimal, Rudi menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan opsi lain, seperti lelang atau pola pemanfaatan lain yang sesuai aturan.

Menurut Rudi, pihaknya tidak ingin aset ini justru memberatkan masyarakat. Apalagi sampai dimanfaatkan oknum untuk menarik tarif di luar ketentuan.

"Seperti yang terjadi di (AKB) Sanipah I, tarif sewanya ternyata jauh di luar aturan retribusi. Semua objek retribusi harus mematuhi tarif resmi dalam perda," pungkasnya. (SULAIMAN DAN HENDRAIRAWAN)



EVA YUNITA



RUDI MANGUNSONG





Kisah Husni, Guru PAUD dari Tabalar

PAHLAWAN PENDIDIKAN DI TENGAH KETERBATASAN

BULAN November adalah bulan memperingati pahlawan. Tak hanya pahlawan di masa kemerdekaan, bulan ini juga sebagai pengingat pahlawan hari ini yang berjuang demi masa depan anak-anak.

Adalah Husni, seorang Kepala Sekolah sekaligus guru PAUD di Kelompok Bermain Sri Rejeki, Desa Semurut, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau.

Dia berkomitmen untuk mengabdikan dan mengajar di tengah keterbatasan fasilitas pendidikan yang ada.

Husni mengaku mulai mengajar sejak 2011 silam, alasannya terjun untuk mengajar anak-anak, karena ia mencintai pekerjaannya.

Husni mengaku sering tidak dibayar, bahkan dirinya juga pernah hanya menerima gaji sebesar Rp 50.000 per bulan.

"Karena saya mencintai pekerjaan saya, enggak digaji pun saya ikhlas kok," ujar Husni kepada Berauterkini.co.id, Selasa (11/11/2025).

Husni bercerita kondisi Sekolah Kelompok Bermain Sri Rejeki jauh dari kata memadai, bahkan tidak ada fasilitas kamar mandi di sekolahnya mengajar.

Dulu, sekolahnya juga tidak



memiliki pagar, sehingga kebersihan sekolah menjadi tidak terawat.

Namun berkat usahanya, dengan meminta bantuan kepada Pemkab Berau maupun DPRD Berau. Kini sekolahnya sudah memiliki pagar.

"Saya berjuang ke pemerintah melalui anggota dewan dan mendapatkan bantuan, jadi lokasinya sudah berpagar", ungkapnya.

Husni mengaku bertahan menjadi guru

PAUD karena ingin menyejahterakan sesama rekan kerjanya.

Menurutnya, profesi sebagai guru PAUD sering dianaktirikan.

Tak hanya profesi guru PAUD yang kerap dianaktirikan, menjadi guru di sekolah swasta juga kerap tak diperhatikan.

Kini Husni bertekad untuk bertahan

bagai guru PAUD di tengah keterbatasan.

Dia ingin guru PAUD lainnya di Berau mendapatkan kesejahteraan dan fasilitas sekolah yang memadai.

"Saya pengen menyejahterakan guru PAUD," ungkapnya.

"Supaya guru PAUD

enggak seperti dianaktirikan, karena kadang yang dimiliki oleh negeri sekarang

tidak dimiliki oleh swasta.

Kami sama-sama menderaskan anak bangsa,

tapi ya mungkin belum rejeki," ungkapnya.

(ANDRIKNI SHO-

LIKHATI)





Belanja APBD Tak Optimal Karena Tender Terlambat

PEMKAB Berau optimis realisasi serapan belanja APBD Berau capai target meski saat ini angkanya baru 60 persen.

Kabag Administrasi Pembangunan Setda Berau Ismiyanto optimis realisasi serapan belanja APBD Berau bisa mencapai target.

Dia menjelaskan, hingga 30 September 2025 realisasi serapan belanja baru mencapai angka sekitar 60 persen.

Menurutnya, angka realisasi serapan belanja APBD akan terus meningkat menjelang akhir tahun.

Sebab serapan belanja APBD pal-

ing banyak dialokasikan untuk program fisik.

"Ada yang sedang on the way, SP2D-nya belum turun biasanya bisa lebih tinggi," ungkapnya kepada Berauterkini.co.id., Rabu (12/11/2025).

"Ada yang sedang masuk, menunggu proses baru turun. Ada yang sedang di tengah jalan, biasanya lebih tinggi, 60 persen mungkin ada kalau yang sudah progres", tambahnya.

Dirinya menyampaikan sejumlah kendala dalam mempercepat realisasi serapan belanja APBD.

Menurutnya faktor keterlambatan proses tender menjadi salah satu penyebab.

"Tendernya mungkin agak sedikit telat karena harus memenuhi kualifikasi beberapa persyaratan, diantaranya PPK harus punya sertifikasi tipe C, B, A.

Tipe C yang paling rendah, itu yang agak nunggu," ujarnya.

Ismiyanto optimis serapan belanja APBD



bisa mencapai target.

Dirinya pun menyarankan percepatan penyelesaian proyek fisik dengan menambah tenaga kerja atau manpower.

"Biasanya kalau mau mempercepat itu ada manpower, manpower itu pekerja konstruksi atau yang mengontrol rantai pasok material, seperti semen," ujarnya.(*)



ISMIYANTO



Cantiknya Tepian Sambaliung Spot Baru Nikmati Sore di Berau

BEGINI suasana Tepian Sambaliung Berau yang semakin indah.

Suasana di Tepian Sambaliung Berau semakin menarik dengan adanya berbagai fasilitas di sepanjang tepian.

Pengamatan Berauterkini.co.id di lokasi, Jumat (14/11/2025), Tepian Sambaliung yang berada di Jalan Tanjung Baru 1 ini memiliki nuansa warna coklat yang mendominasi sepanjang tepian tersebut.

Lampu-lampu jalan yang terukir dengan ukiran dayak menambah keindahan tepian yang bernuansa coklat itu.

Kursi berukuran panjang berwarna putih menambahkan kelengkapan tepian untuk memudahkan pengunjung yang datang untuk bersantai.

Rombongan pedagang juga terlihat menghiasi tepian. Bedanya, rombongan pedagang tidak terletak tepat di atas jalanan tepian, sehingga tidak membuat jalanan tepian terlihat penuh.

Lampu-lampu jalan juga menghiasi tepian tersebut, mulai dari ukuran kecil sampai yang paling tinggi.



Banyaknya lampu jalan tidak membuat penerangan ketika malam hari semakin bagus, justru malah lampu tersebut banyak yang tidak menyala, sehingga hanya mengandalkan cahaya lampu dari rumah warga.

Selain itu, di sepanjang tepian juga tersedia tempat sampah agar pengunjung tidak bingung untuk membuang sampah dan menghindari membuang sampah sembarangan.

Tepian Sambaliung baru cenderung bersih. Pohon palem yang tumbuh di sekitar tepian juga menambah keindahan Tepian Sambaliung.

Susana di Tepian Sambaliung juga lengang, terlihat ha-

nya ada beberapa anak-anak yang sedang bermain di sekitar Tepian Sambaliung.

Karena itu, Tepian Sambaliung cocok menjadi tempat yang harus dikunjungi di Berau untuk sekedar bersantai atau berolahraga.

Menurut warga sekitar, yakni Hanuti, Tepian Sambaliung di Jalan Tanjung Baru 1, menjadi daya tarik banyak orang.

Banyak orang yang berkunjung untuk sekedar membuat konten promosi makanan dikarenakan lokasinya yang bagus.

"Iya ini baru, belum ada sejarah", ungkap Hanuti.

Ia juga mengatakan bahwa pengunjung yang datang

sekedar duduk-duduk di kursi rombongnya atau di kursi yang sudah tersedia di tepian.

Meski demikian, warga sekitar juga berharap Pemkab Berau mampu memperbaiki lampu jalan yang kerap mati.

"Pengunjung bilang cantik tepiannya, tapi ya itu lampunya", ujarnya.

Warga lain yakni Suriansyah juga mengungkapkan hal yang sama.

Dia mengatakan, kondisi lampu di Tepian Sambaliung yang kerap mati membuat jumlah orang yang berkunjung semakin sepi.

"Rame tapi enggak terlalu rame juga lah, karena ini pengaruh juga lampu gelap", ungkapnya.

"Sudah sebulan lebih lampu mati. Palingan lampu nyala cuma bertahan 2 atau 3 hari, habis itu mati lagi", jelasnya.

Menurutnya, warga sekitar berharap agar lampu di Tepian Sambaliung bisa diperbaiki sehingga jumlah pengunjung semakin banyak dan menggerakkan usaha warga sekitar.

"Kan kalau di sini banyak pengunjung kita bisa berjualan juga", ungkapnya. **(ANDRIKNI SHOLIKHATI)**



**Berau
Terkini**
tak berhenti

DIREKSI

Komisaris : M. Syaifuddin Zuhrie
Direktur : Rengkuh Enggalingtyaz, **Digital Marketing Manager** : Aidil Anugrah, **Ikhtan** : Siti Nur Ariska, **Admin** : Tariska Ramadayani

Advokat & Konsultan Hukum : Firma Hukum H.A.M & Partner

Email Redaksi : berauterkini2023@gmail.com, **iklan dan informasi** : berauterkini2023@gmail.com

Alamat Redaksi : Ruko Komplek Perumahan Berau Indah, **Telepon** : 0851-6366-0045

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi : Robithoh Johan Palupi,
Koordinator Liputan : Rusdiyono, **Editor** : Maulana Ilhami Fawdi, **Reporter** : Sulaiman, Hendra Irawan, Dini Diva, Nadya Zahira, **Grasis** : Surya Adji Permana,
Media Sosial : Siti Nur Ariska, **IT & Web Development** : Fathurrohman.